

Pengelolaan Gelanggang Olahraga H. Agus Salim Padang

(Reno Reynaldo, 1210112223, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016, 74 Halaman)

ABSTRAK

Gelanggang Olahraga H. Agus Salim merupakan sarana dan prasarana olahraga di Kota Padang untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang keolahragaan. Sebagai barang milik daerah, Gelanggang Olahraga H. Agus Salim bukanlah milik Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Padang hanya diberikan hak pengelolaannya saja, sementara asetnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pengelolaan Gelanggang Olahraga tidak berjalan maksimal. Penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan, yakni : 1) Bagaimana pengelolaan Gelanggang Olahraga H. Agus Salim 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Gelanggang Olahraga H. Agus Salim. Adapun pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: Dalam Pengelolaan GOR H. Agus Salim dalam ruang lingkup pemanfaatan, ditemukan adanya disfungsi dan inkonsistensi pengelolaan barang milik daerah yang harusnya digunakan sebagai sarana dan prasarana olahraga namun digunakan untuk tempat tinggal, tempat berjualan, dan untuk kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan keolahragaan, sehingga pemanfaatan Gelanggang Olahraga belum sepenuhnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Masalah yang dihadapi terkait pengelolaannya yaitu masih ada bangunan di GOR H. Agus Salim yang digunakan sebagai tempat tinggal dan berjualan meskipun sudah disurati oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, belum adanya pagar atau tanda batas GOR H. Agus Salim sehingga pungutan liar kerap terjadi. Anggaran yang minim menyebabkan sarana dan prasarana olahraga banyak yang terbengkalai dalam pembangunannya, hal itu juga dikarenakan karena status kepemilikan GOR. H. Agus Salim masih merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.